

masyarakat. Dalam pelaksanaan tugasnya Pekerjaan Umum memiliki beberapa bidang salah satunya adalah bidang Pemeliharaan dan Pengendalian kebinamargaannya. Kemudian untuk mencapai hasil yang diinginkan diperlukan kinerja yang maksimal dari setiap pegawai yang bekerja dalam instansi tersebut. Pelaksanaan tugas dan pekerjaan merupakan suatu kewajiban bagi para pegawai di dalam suatu instansi, samahalnya dengan instansi pemerintahan. Di dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan tersebut tentunya pasti mempunyai suatu tujuan yang sama yakni mengharapkan suatu hasil pekerjaan dan tugas yang baik serta memuaskan sesuai dengan apa yang ditentukan sebelumnya. Untuk mendapatkan suatu hasil kinerja yang baik dan sesuai dengan tujuan instansi, maka setiap pimpinan suatu instansi diharuskan mempunyai suatu aturan dan ketentuan yang dituangkan dalam bentuk kebijakan. Kebijakan ini dibuat dengan maksud agar setiap komponen instansi melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagai kota yang besar, Bandung diharapkan memiliki jalan yang layak dan berjalan sesuai dengan fungsi jenis jalan tersebut. Suatu jalan dikatakan layak yaitu mempunyai infrastruktur pendukung jalan seperti rambu rambu lalu lintas, lampu penerangan jalan, bahu jalan dan sistem pengairan jalan seperti drainase. Banyak di kota kota besar salah satunya kota bandung infrastruktur pendukung jalan seperti drainase masih banyak yang perannya tidak sesuai fungsinya contohnya masih banyak sampah-sampah yang berserakan di drainase yang mengakibatkan penyempitan aliran yang menyebabkan banjir dan genangan air sehingga membuat jalan menjadi rusak.

Jika dilihat dengan kondisi lapangan, jalan kota Bandung masih banyak yang jauh dari kata layak, jalan kota masih banyak yang belum diperbaiki dan tidak dapat disebut sebagai prasarana yang layak bagi masyarakat kota Bandung. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh kinerja dari instansi yang bergerak di bidang pemeliharaan dan pengendalian jalan yakni Dinas Pekerjaan Umum kota Bandung.

Di dalam upaya mencapai tujuan tersebut, perlu adanya suatu faktor yang harus dimiliki oleh pemimpin, yakni implementasi kebijakan. Kebijakan tersebut akan menimbulkan Semangat kerja itu sendiri timbul dan tumbuh dalam diri pegawai yang disebabkan adanya motivasi dari pimpinan dalam arti pimpinan memberi kebijakan atau dorongan kepada pegawai, di mana motif itu sendiri menyangkut pada kebutuhan pegawai, baik kebutuhan batiniah maupun kebutuhan lahiriah.

Mengingat betapa pentingnya kinerja pegawai terhadap perwujudan tujuan instansi, dalam hal ini adalah Bidang Pemeliharaan dan Pengendalian Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung, sangat disayangkan karena pada kenyataannya kinerja pegawai dalam membangun dan memelihara kebinamargaan belum optimal. Dalam Kasus ini, Dinas Pekerjaan Umum merupakan instansi pemerintah yang memiliki tugas salah satunya dalam melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan. Sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 475 tahun 2008 Bidang pembangunan dan pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum kota Bandung memiliki fungsi sebagai :

- a. Pelaksanaan lingkup pembangunan kebinamargaan yang meliputi pembangunan jalan, jembatan, trotoar, drainase dan penerangan jalan umum.

- b. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pemeliharaan kebinamargaan
- c. Pelaksanaan lingkup pemeliharaan kebinamargaan yang meliputi, pemeliharaan jalan, jembatan dan trotoar.

Kinerja pelayanan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung dilihat berdasarkan capaian terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK). Capaian kinerja indikator pelayanan SKPD DPU dalam pelaksanaan program dan kegiatannya.

1. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah jenis indikator untuk evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2007.

a. Pelayanan Jaringan Jalan

Meskipun proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kota Bandung cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya (2013-2015), namun masih belum memadai untuk mendukung pergerakan orang dan barang. Pada tahun 2013, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik mencapai 68,96% meningkat menjadi 91,22% pada tahun 2015. Masih ada sekitar 8,78% panjang jaringan jalan di Kota Bandung yang masih dalam kondisi rusak sedang atau berat. Faktor-faktor berpengaruh terhadap peningkatan capaian pelayanan jalan:

- a.) Dengan keterbatasan dana perbaikan jalan, adanya skala prioritas penanganan jalan berdasarkan tingkat kerusakan jalan, volume lalulintas, fungsi jalan, dan jalur angkutan umum.

- b.) Sinkronisasi anggaran bantuan provinsi tidak dapat direalisasikan karena turunnya pada triwulan IV.
- c.) Pelaksanaan kegiatan peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan mengalami keterlambatan dalam penyelesaiannya karena pengaruh cuaca hujan sepanjang tahun, dengan demikian pelaksanaan kegiatan fisik dimulai pada musim hujan, sehingga perbaikan jalan dilakukan berulang. Kondisi tersebut tidak didukung oleh kondisi fisik.
- d.) wilayah kota Bandung sebagai daerah cekungan dengan kandungan air tanah tinggi yang dapat mempercepat kerusakan fisik jalan. Potensi kerusakan jalan di Bandung jauh lebih besar pada saat kondisi basah dibandingkan pada kondisi kering. Hal ini disebabkan air sering tidak tertampung dan menggenangi banyak segmen jalan, baik saluran pinggir jalan maupun saluran-lauran pembuangan lainnya.

b. Pelayanan Jaringan Drainase

Secara umum sistem drainase di Kota Bandung terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu drainase makro dan drainase mikro. Saluran pembuangan makro adalah saluran pembuangan yang secara alami sudah ada di Kota Bandung, yang terdiri dari 15 sungai sepanjang 265,05 km. Saluran pembuangan mikro adalah saluran yang sengaja dibuat mengikuti pola jaringan jalan. Namun, sekitar 30% ruas jalan belum memiliki saluran drainase sehingga beberapa daerah menjadi rawan banjir dan genangan. Penyebab terjadinya daerah rawan banjir adalah karena tertutupnya street inlet oleh beberapa aktivitas sehingga air hujan tidak bisa masuk ke dalam saluran drainase, adanya pendangkalan

di beberapa bagian saluran, konstruksi drainase yang tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan, serta pengalihfungsian lahan dari kondisi alami menjadi lahan dengan fungsi komersil seperti pertokoan, mall, jalan, perumahan, dan lain-lain sehingga tutupan lahan pun berubah yang meningkatkan debit limpasan. Faktor-faktor berpengaruh terhadap peningkatan capaian pelayanan jaringan drainase:

- a.) Penanganan banjir tidak dapat diselesaikan secara partial, harus menyeluruh dari hulu hingga hilir sesuai dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan memerlukan dana yang cukup besar untuk pembebasan lahan dan konstruksi.
- b.) Pembebasan lahan yang belum tuntas berdampak pada keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- c.) Perilaku masyarakat yang belum sadar kebersihan, keindahan, dan ketertiban (K3), berdampak pada meningkatnya sedimentasi saluran akibat sampah dan berakibat terjadinya genangan dan banjir.
- d.) Partisipasi sebagian masyarakat dalam melakukan kebersihan saluran/kali di sekitar rumahnya dikarenakan kurangnya kepedulian.

Ketidak sesuaian kenyataan lapangan dengan tugas pokok dan fungsi Bidang Pemeliharaan dan Pengendalian dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai Dinas Pekerjaan Umum masih belum optimal dimana hal tersebut dapat dilihat dengan aspek penilaian kinerja sektor publik, menurut **Van meterdan Van Horn** juga menyatakan variable yang mempengaruhi kebijakan publik seperti dikutip oleh **Riant Nugroho** dalam bukunya public policy (2014) antara lain:

1. Karakteristik agen pelaksana

Hasil yang dicapai pada akhirnya akan ada dua kemungkinan diterima masyarakat atau ditolak oleh masyarakat. Contohnya seperti alih fungsi lahan yang berada dikawasan bandung utara sebagai sikap penolakan masyarakat terhadap alih fungsi lahan. Penerimaannya menambah atau memperbaiki aliran air atau drainase yang disesuaikan dan kondisi yang berada dikawasan tersebut.

2. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik merupakan faktor pendukung dalam keberhasilan upaya penanganan jalan yang rusak serta faktor pendukung seperti lampu penerangan jalan, trotoar, aliran air atau drainase terlebih pada kinerja implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Dilihat dari faktor ekonomi seperti banyaknya mobil yang parkir di trotoar, banyak sampah yang mengakibatkan penyempitan aliran air dapat merugikan hal layak umum. Faktor sosial banyaknya kalangan masyarakat serta pengguna jalan terganggu dengan jalan yang berlubang serta faktor pendukung jalan yang jauh dari kata layak. Faktor politik yang tidak kondusif dapat menjadi salah satu kegagalan dari kinerja implementasi kebijakan.

Berdasarkan dari hasil diatas, peneliti menduga masalah tersebut disebabkan oleh implementasi kebijakan yang kurang optimal. Sehingga menyebabkan Kurangnya Disposisi dari ketua Bidang Pemeliharaan dan Pengendalian Dinas Pekerjaan Umum terhadap kinerja pegawai dalam melaksanakan pekerjaan sehingga menyebabkan kurang maksimalnya hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai dinas pekerjaan umum.

Oleh karena latar belakang permasalahan dan penyebab tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul: **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI KOTA BANDUNG PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BANDUNG”**

B. Fokus Penelitian

Untuk membatasi masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini, maka penulis hanya melakukan penelitian di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum (DPU), khususnya mengenai bagaimana kebijakan program infrastruktur jalan raya di kota Bandung. Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah penulis dalam hal ini adalah sebagai berikut adalah **“Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Infrastruktur Jalan dalam Pemeliharaan dan Pengendalian (khususnya jalan pagarsih) Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung?”**

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilaksanakan pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai, hal ini dimaksudkan dapat memberikan arah kepada seseorang peneliti dalam pelaksanaan kegiatannya agar dapat kemana seharusnya berjalan dan berbuat.

1. Mengetahui implementasi kebijakan dalam menangani pembangunan infrastruktur pembangunan jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum.
2. Mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dalam implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Kota Bandung.
3. Mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dalam implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan Kota Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian terdiri dari kegunaan-kegunaan teoritis yang berdasarkan kontekstual dan konseptual dan kegunaan praktis untuk perbaikan bagi lembaga instansi yang bersangkutan.

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta memperoleh wawasan dalam menerapkan teori-teori yang peneliti peroleh selama perkuliahan di Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya mengenai implementasi kebijakan publik.

2. Kegunaan Praktis

Selain menambah pengalaman yang berguna bagi peneliti untuk dapat berpikir kritis dan dinamis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan Aparatur Sipil Negara agar memahami implementasi kebijakan public sebagai alat untuk menilai sebelum dan mengevaluasi sesudah suatu kebijakan dilaksanakan, agar tujuan suatu kebijakan publik dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan bersama.